

Judul : Dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi
Tanggal : Senin, 20 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Dampak Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi

DPR Ingatkan Fenomena Peralihan Konsumsi Energi

Senayan mengingatkan Pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi. Salah satu dampaknya adalah peralihan konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke subsidi.

ANGGOTA Komisi VI DPR Firmando Ganinduto mengatakan, kenaikan harga energi itu juga bisa mengganggu kestabilan ekonomi nasional serta menaikkan harga kebutuhan pokok. Dampak terbesar menyasar kelompok masyarakat kelas menengah dengan meningkatnya beban pengeluaran rumah tangga sekaligus menekan daya beli.

Firmando mengatakan, kondisi itu bisa memicu fenomena turun kelas energi. Yakni peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke jenis subsidi. Makanya, pergeseran itu harus diantisipasi dengan pengawasan yang jauh lebih ketat di lapangan. "Ini demi memastikan BBM subsidi tetap tepat sasaran," ingatnya, kemarin.

Firmando menekankan, BBM subsidi tidak boleh dinikmati kelompok masyarakat mampu. Harus ada penguatan sistem pengawasan serta pengetatan distribusi di lapangan untuk

mencegah penyalahgunaan. Langkah ini sangat strategis agar hak-hak masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan bantuan subsidi energi terlindungi dengan baik.

Pemerintah, sambungnya, juga harus bisa mengendalikan dampak tidak langsung kebijakan itu melalui pengaturan sektor logistik nasional. Ini dilakukan dengan mendorong kontrol ketat terhadap tarif logistik serta pemberian berbagai insentif bagi pengusaha. Tujuannya agar biaya distribusi tidak meningkat yang memicu lonjakan harga barang.

Selanjutnya, kata dia, stabilisasi harga pangan juga harus jadi perhatian utama. Pemerintah diminta untuk mengintensifkan langkah nyata seperti operasi pasar. Langkah lainnya adalah intervensi distribusi guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi rakyat. Upaya ini ha-

rus dilakukan di tengah dinamika kenaikan harga energi global.

DPR, lanjutnya, akan terus memantau implementasi kebijakan ini serta mendorong evaluasi berkala sebagai bagian fungsi pengawasan legislatif. Langkah itu untuk memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan efek domino terhadap inflasi nasional. "Kesejahteraan masyarakat harus tetap terlindungi melalui kontrol yang konsisten dan kebijakan yang tepat," ucapnya.

Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim menambahkan, kenaikan harga BBM nonsubsidi jadi langkah yang tidak mudah dihindari saat ini. Dalam situasi global dan tekanan besar terhadap sektor energi, penyesuaian harga itu merupakan opsi yang akhirnya harus diambil Pemerintah untuk menjaga APBN.

Momentum dan komunikasi kebijakan ini, kata Rivqy, harus jadi perhatian khusus agar tidak menimbulkan kegelisahan atau kepanikan di tengah masyarakat. Pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka kondisi riil BBM nasional kepada publik. Transparansi terkait ketersediaan stok

hingga tantangan distribusi akan membantu masyarakat memahami alasan kebijakan pahit itu.

Rivqy juga menyoroti perlunya langkah antisipatif yang jelas dari Pemerintah dan BUMN energi dalam menjaga stabilitas pasokan energi. Pasalnya, kesiapan strategi pengelolaan distribusi dan cadangan energi harus dipastikan berjalan optimal. "Sinergi antarlembaga sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan bahan bakar di daerah," ujarnya.

Kenaikan harga ini diharapkan tidak berdampak luas terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Sebab, penyesuaian harga hanya terjadi pada jenis BBM dengan RON tinggi. Hal itu seharusnya tidak langsung memicu lonjakan harga barang kebutuhan dasar bagi publik.

Pemerintah diharapkan terus mengedepankan komunikasi publik yang transparan serta kebijakan yang berpihak pada perlindungan rakyat kecil. Langkah itu sangat strategis di tengah dinamika ekonomi yang penuh ketidakpastian. "Kepentingan masyarakat harus selalu jadi

pertimbangan utama dalam tiap pengambilan keputusan terkait energi," katanya.

Diketahui, Pertamina menaikkan sejumlah harga BBM nonsubsidi mulai Sabtu 18 April 2026. Berdasarkan informasi resmi di situs MyPertamina, harga Pertamina Turbo dengan RON 98 naik dari Rp 13.100 per liter jadi Rp 19.400 per liter. Kenaikan ini disebut telah menyesuaikan tren harga minyak mentah dunia.

Kenaikan harga juga terjadi pada jenis bahan bakas diesel, Dexlite, dari Rp 14.200 per liter jadi Rp 23.600 per liter di seluruh wilayah Indonesia. Hal serupa terjadi pada harga Pertamina Dex yang naik dari Rp 14.500 per liter jadi Rp 23.900 per liter. Kenaikan itu juga telah disesuaikan dengan mekanisme pasar global.

Sementara itu, untuk saat ini harga Pertamina dengan RON 92 masih tetap Rp 12.300 per liter. Harga BBM jenis Paltelite masih dipatok Rp 10 ribu per liter, serta Pertamina Biosolar tetap Rp 6.800 per liter. Pemerintah masih memberikan subsidi besar agar harga jenis BBM itu tetap terjangkau. ■ PYB